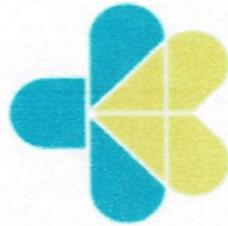


**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEBIJAKAN STRATEGI DAN TATA KELOLA  
KESEHATAN GLOBAL**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harditya Suryawanto  
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asnawi Abdullah  
Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

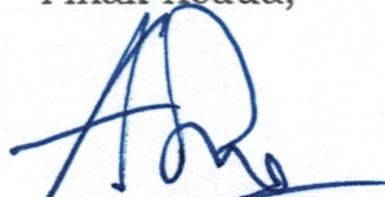
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

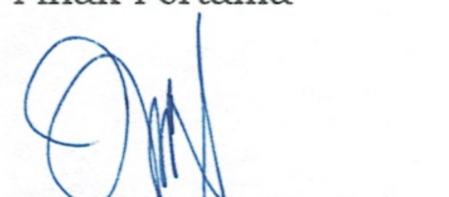
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Februari 2025

Pihak Kedua,

  
**Asnawi Abdullah**

Pihak Pertama

  
**Harditya Suryawanto**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PUSAT KEBIJAKAN STRATEGI DAN TATA KELOLA  
KESEHATAN GLOBAL**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Program/Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> |
|------------|--|--|---------------|
| (1)        | (2)  | (3)  | (4)           |
| 1.         | Meningkatnya kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan berbasis bukti | 1. Tersusunnya blueprint pengelolaan kerjasama internasional berdasarkan kriteria negara dan lembaga                               | 1             |
|            |  | 2. Jumlah dokumen kerjasama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan                              | 10            |
|            |  | 3. Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti                            | 100           |
|            |  | 4. Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti  | 100           |
|            |  | 5. Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti                           | 100           |
|            |  | 6. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan | 100           |
|            |  | 7. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan  | 100           |
| 2.         | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya           | 1. Persentase Realisasi Anggaran BKPK  | 96            |

**Kegiatan****Anggaran**

1. Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan  
Teknologi Kesehatan

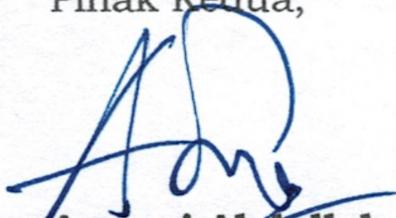
Rp 142.473.412.000

Total Anggaran Unit Kerja Pusat Kebijakan Strategi dan  
Tata Kelola Kesehatan Global

Rp **142.473.412.000**

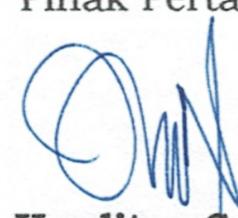
Jakarta, 14 Februari 2025

Pihak Kedua,



**Asnawi Abdullah**

Pihak Pertama



**Harditya Suryawanto**